

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan beberapa regulasi pendukung untuk menggali potensi sektor perkebunan dan industri kelapa sawit. Beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh DJP antara lain :

- PER-174/PJ/2007 tanggal 26 Desember 2007 tentang pedoman penentuan Standar Investasi Tanaman (SIT) kelapa sawit dan SE-65/PJ/2007 tanggal 26 Desember 2007 tentang petunjuk pelaksanaannya. Tujuan dikeluarkannya regulasi tersebut adalah untuk mencapai keseimbangan SIT di seluruh wilayah Indonesia. Data yang digunakan berdasarkan pembagian wilayah sesuai yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkebunan. SIT kelapa sawit ditetapkan per tahun tanam (TBM dan TM) sehingga besarnya nilai investasi yang dikeluarkan oleh para pengusaha perkebunan kelapa sawit dapat terstandarisasi.
- Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S - 67/PJ.081/2007 tanggal 20 September 2007 tentang Penggalan Potensi Wajib Pajak Industri Kelapa Sawit yang sekaligus merupakan dasar hukum untuk melakukan pemanggilan 17 Group Wajib Pajak industri kelapa sawit dalam rangka penggalan potensi. Wajib pajak yang dimaksud dalam S-67/PJ.081/2007 adalah Sinar Mas Group, Minamas Group, Salim Group, Astra Agro Lestari Group, Duta Palma Nusantara Group, Sungai Budi Group, Austindo Group, Selapan Jaya Group, Benua Indah Group, Agro Manunggal Group, Lyman Group, Surya Damai Group, Risjadson Group, Incasi Raya Group, Djayanti Group, Kaestindo Group dan Mukti Group.
- Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S - 61/PJ.081/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Langkah-langkah penggalan potensi usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan dikeluarkannya regulasi perpajakan ini terutama untuk mengintensifkan penggalan potensi penerimaan pajak dari sektor usaha perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan data internal Direktorat Jenderal Pajak tercatat 23 Kantor Wilayah dari 31 Kantor Wilayah yang memiliki wajib pajak untuk sektor industri dan perkebunan kelapa sawit. Sesuai dengan data dari Departemen Pertanian, jumlah wajib pajak terbesar terletak di kepulauan Sumatera. Data rekapitulasi jumlah wajib pajak sektor

industri dan perkebunan kelapa sawit dari 2 KLU adalah sebagai berikut :

Tabel 11

Jumlah wajib pajak sektor industri dan perkebunan kelapa sawit

No	Nama Kanwil	Jumlah Wajib Pajak		
		2005	2006	2007
1	Kanwil NAD	31	37	38
2	Kanwil Sumut I	138	148	182
3	Kanwil Sumut II	42	44	37
4	Kanwil Riau dan Kep. Riau	156	163	157
5	Kanwil Sumbar dan Jambi	53	54	61
6	Kanwil Sumsel & Babel	32	40	62
7	Kanwil Bengkulu & Lamp	30	25	29
8	Kanwil Jakpus	116	124	159
9	Kanwil Jaksel	23	44	51
10	Kanwil Jaktim	55	74	76
11	Kanwil Jakbar	14	21	28
12	Kanwil Jakut	8	10	16
13	Kanwil Jak-Khusus	54	75	89
14	Kanwil Jabar	3	3	4
15	Kanwil Jatim I	4	2	4
16	Kanwil Jatim II	5	6	4
17	Kanwil Kalbar	12	11	11
18	Kanwil Kalsel-Teng	28	29	47
19	Kanwil Kaltim	25	31	29
20	Kanwil Sulsel	24	36	53
21	Kanwil Sulut	13	12	8
22	Kanwil Bali	7	5	5
23	Kanwil LTO	8	9	7
	Total	881	1003	1157

Sumber Dit. TIP : data diolah

Berdasarkan data diatas, jumlah wajib pajak terbesar terdaftar di Kanwil Sumut I sebanyak 182 untuk tahun pajak 2007. Peningkatan jumlah wajib pajak per kantor wilayah secara rata-rata setiap tahun mencapai 20 %.

Tingkat kepatuhan wajib pajak sektor industri dan perkebunan kelapa sawit dalam menyetorkan dan melaporkan kewajibannya (dalam hal ini PPh pasal

25) di tinjau dari 2 (dua) klasifikasi lapangan usaha, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 12
Jumlah setor dan lapor PPh pasal 25

No	Nama Kanwil	Jumlah setor dan lapor PPh pasal 25 (dalam Rupiah)		
		2005	2006	2007
1	Kanwil NAD	2.880.817.951	2.937.260.656	38.504.735.456
2	Kanwil Sumut I	97.999.217.979	128.150.006.130	173.962.690.425
3	Kanwil Sumut II	8.567.444.532	10.735.402.725	28.073.142.948
4	Kanwil Riau dan Kep. Riau	182.747.018.000	153.153.356.738	336.397.946.015
5	Kanwil Sumbar Jmbi	34.895.327.961	22.983.702.975	50.724.463.942
6	Kanwil Sumsel Babel	16.362.327.961	36.646.655.941	66.328.128.635
7	Kanwil Bgkl & Lamp	9.423.857.681	10.451.310.670	13.361.526.629
8	Kanwil Jakpus	9.153.805.384	67.088.751.350	485.966.979.636
9	Kanwil Jaksel	1.386.130.400	111.075.285.852	341.116.893.194
10	Kanwil Jaktim	88.318.114.955	106.681.040.950	275.656.000.497
11	Kanwil Jakbar	374.505.442	1.326.407.233	8.821.833.502
12	Kanwil Jakut	30.364.602	2.933.336.643	7.411.980.746
13	Kanwil Jak-Khusus	271.481.432.263	230.685.334.207	518.822.023.686
14	Kanwil Jabar	2.791.557.012	280.154.280	3.075.147.276
15	Kanwil Jatim I	100.469.906	25.643.926	28.786.968
16	Kanwil Jatim II	0	1.302.248.760	1.604.164.090
17	Kanwil Kalbar	40.240.218	152.585.620	660.639.102
18	Kanwil Kalsel-Teng	24.821.519.801	26.942.867.700	58.951.066.000
19	Kanwil Kaltim	12.718.000	7.981.880	10.175.721
20	Kanwil Sulsel	2.525.094	3.352.278	6.392.709
21	Kanwil Sulut	21.196.300	25.298.770	1.126.149.664
22	Kanwil Bali	3.216.136	2.652.754	6.300.559
23	Kanwil LTO	341.295.473.376	220.735.249.505	1.181.437.227.944
	Total	1.092.709.281.542	1.134.325.887.543	3.592.054.395.344

Sumber Dit. TIP : data diolah

Berdasarkan tabel 12, jumlah penerimaan PPh pasal 25 yang berasal dari 23 kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak sektor industri dan perkebunan kelapa sawit tahun pajak 2005 sebesar Rp 1.092.709.281.542,- ; tahun pajak 2006 sebesar Rp 1.134.325.887.543,- ; dan tahun pajak 2007 sebesar

Rp 3.592.054.395.344,-. Dalam persentase, kepatuhan wajib pajak sektor industri dan perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan 3,8 % untuk tahun pajak 2005-2006 dan 216,7 % untuk tahun pajak 2006-2007.

Pada tahun pajak 2005, jumlah penyeteran dan pelaporan PPh pasal 25 diatas 100 miliar rupiah hanya mencakup 3 kantor wilayah yaitu :

1. Kantor wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp 182.747.018.000,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 156.
2. Kantor wilayah Jakarta Khusus sebesar Rp 271.481.432.263,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 54.
3. Kantor wilayah LTO sebesar 341.295.473.376,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 8.

Tahun pajak 2006, jumlah kantor wilayah dengan penyeteran dan pelaporan PPh pasal 25 diatas 100 miliar rupiah sebanyak 6 kantor wilayah, yaitu :

1. Kantor wilayah Sumut I sebesar Rp 128.150.006.130,- dengan wajib pajak sebanyak 148.
2. Kantor wilayah Riau dan Kep. Riau sebesar Rp 153.153.356.738,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 163.
3. Kantor wilayah Jaksel sebesar Rp 111.075.285.852,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 44.
4. Kantor wilayah Jaktim sebesar Rp 106.681. 040.950,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 74.
5. Kantor wilayah Jakarta Khusus sebesar Rp 230.685.334.207,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 75.
6. Kantor wilayah LTO sebesar Rp 220.735.249.505,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 9.

Sementara, pada tahun pajak 2007 terdapat 6 kantor wilayah yang mencatat penerimaan PPh pasal 25 diatas 100 miliar rupiah dan 1 kantor wilayah yang mencatat penerimaan diatas 1 triliun rupiah yaitu :

1. Kantor wilayah Sumut I sebesar Rp 173.962.690.425,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 182.
2. Kantor wilayah Riau dan Kep. Riau sebesar Rp 336. 397.946.015,- dengan jumlah

wajib pajak sebanyak 157.

3. Kantor wilayah Jakpus sebesar Rp 485.966.979.636,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 159.
4. Kantor wilayah Jaksel sebesar Rp 341.116.893.194,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 51.
5. Kantor wilayah Jaktim sebesar Rp 275.656.000.497,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 76.
6. Kantor wilayah Jakarta Khusus sebesar Rp 518.822.023.686,- dengan wajib pajak sebanyak 89.
7. Kantor wilayah LTO sebesar Rp 1.181.437.227.944,- dengan wajib pajak sebanyak 7.

Berdasarkan data pada tabel 13, sebelum dilakukan penyidikan pajak atas Asian Agri Group yaitu tahun pajak 2005-2006, pertumbuhan penerimaan pajak yang berasal dari PPh pasal 25 cenderung berfluktuasi. Terdapat persentase pertumbuhan yang negatif di beberapa kantor wilayah. Artinya, beberapa kantor wilayah mengalami penurunan penerimaan negara dari sektor industri dan perkebunan kelapa sawit dari tahun pajak 2005 ke tahun pajak 2006. Sebaliknya, setelah dilakukan penyidikan pajak atas Asian Agri Group, hampir semua kantor wilayah mengalami peningkatan pertumbuhan dan beberapa kantor wilayah yang lain mengalami penurunan pertumbuhan penerimaan pajak. Meskipun demikian, pada tahun pajak 2007 tidak terdapat angka pertumbuhan negatif dengan kata lain semua Kantor Wilayah mencatat adanya kenaikan pembayaran angsuran PPh pasal 25 dari tahun pajak 2006 ke tahun pajak 2007.

Pertumbuhan penerimaan pajak per kantor wilayah yang mengindikasikan adanya peningkatan atau penurunan kepatuhan wajib pajak sektor industri dan perkebunan kelapa sawit antara sebelum dan setelah penyidikan pajak atas Asian Agri Group dalam bentuk data persentase dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 13
 Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak

No	Nama Kanwil	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak	
		2005-2006	2006-2007
1	Kanwil NAD	1,96 %	1.210,91 %
2	Kanwil Sumut I	30,77 %	35,75 %
3	Kanwil Sumut II	25,30 %	161,50 %
4	Kanwil Riau dan Kep. Riau	-16,19 %	119,65 %
5	Kanwil Sumbar dan Jambi	-34,14 %	120,70 %
6	Kanwil Sumsel & Babel	123,97 %	80,99 %
7	Kanwil Bengkulu & Lamp	10,90 %	27,85 %
8	Kanwil Jakpus	632,91 %	624,36 %
9	Kanwil Jaksel	7.913,34 %	207,10 %
10	Kanwil Jaktim	20,79 %	158,39 %
11	Kanwil Jakbar	254,18 %	565,09 %
12	Kanwil Jakut	9.560,38 %	152,68 %
13	Kanwil Jak-Khusus	-15,03 %	124,90 %
14	Kanwil Jabar	-89,96 %	997,66 %
15	Kanwil Jatim I	-74,48 %	12,26 %
16	Kanwil Jatim II	0 %	23,18 %
17	Kanwil Kalbar	279,19 %	332,96 %
18	Kanwil Kalsel-Teng	8,55 %	118,80 %
19	Kanwil Kaltim	-37,24 %	27,49 %
20	Kanwil Sulsel	32,76 %	90,70 %
21	Kanwil Sulut	19,35 %	4.351,40 %
22	Kanwil Bali	-17,52 %	137,51 %
23	Kanwil LTO	-35,32 %	435,23 %

Sumber Dit. TIP : data diolah

Penurunan pertumbuhan penerimaan pajak tahun pajak 2007 yang terbesar dialami oleh Kantor Wilayah Jaksel dan Kantor Wilayah Jakut. Penurunan tersebut dikarenakan program intensifikasi maupun ekstensifikasi yang dilakukan oleh beberapa kantor wilayah telah dijalankan dengan baik. Sebagai contoh Kanwil Jaksel, terdapat kenaikan pembayaran PPh pasal 25 yang meningkat secara tajam pada tahun pajak

2006. Penerimaan pajak dari PPh pasal 25 berdasarkan 2 klasifikasi sektor industri dan perkebunan kelapa sawit di Kanwil Jaksel pada tahun pajak 2005 hanya sebesar Rp 1.386.130.400,- dan tahun pajak 2006 menjadi sebesar Rp 111.075.285.852,- atau mengalami kenaikan penerimaan pajak 7.913,34 % dengan peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 91 % (dari 23 wajib pajak menjadi 44 wajib pajak).

Penerimaan pajak untuk tahun pajak 2007 menunjukkan angka pertumbuhan yang positif di semua kantor wilayah. Beberapa kantor wilayah yang semula mencatatkan angka pertumbuhan negatif untuk tahun pajak 2005-2006 mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk tahun pajak 2006-2007 diantaranya kanwil Riau, kanwil Sumbar dan Jambi, kanwil Jak- Khusus, kanwil Jabar I, kanwil Jatim I, kanwil Kaltim, kanwil Bali dan kanwil LTO. Pertumbuhan rata-rata tahun pajak 2006-2007 berkisar antara 27,49 % sampai dengan 997,66 %. Angka pertumbuhan penerimaan pajak tersebut tentunya tidak lepas dari peran regulasi pajak, sosialisasi regulasi serta adanya *law enforcement* di sektor industri dan perkebunan kelapa sawit.

Rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 25 dibandingkan dengan kenaikan harga minyak kelapa sawit dunia dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 14

Harga rata-rata minyak kelapa sawit di pasar domestik dan internasional 1988-2007

Tahun	Harga lokal (Rp/kg)	Harga internasional (US\$/ton)
1998	3.600	663
1999	-	436
2000	3.217	310
2001	3.242	286
2002	4.212	390
2003	4.267	443
2004	4.584	471
2005	4.825	422
2006	4.701	477
2007	6.480	780

Sumber : Ditjenbun, 2007

Rata-rata kenaikan harga minyak kelapa sawit tahun 2006-2007 di pasar domestik mencapai 37,8 % dan di pasar internasional mencapai 63,5 %. Secara persentase, apabila dibandingkan dengan kenaikan penerimaan pajak yang mencapai 216,7 % antara tahun pajak 2006-2007 maka dapat diketahui bahwa kenaikan harga minyak kelapa sawit lokal maupun internasional bukanlah merupakan faktor utama penyebab

peningkatan pembayaran PPh pasal 25 di tahun pajak 2007. Potensi kenaikan harga CPO terhadap jumlah pembayaran PPh pasal 25 tahun pajak 2007 apabila dibandingkan dengan jumlah pembayaran PPh pasal 25 menurut SPT 2006 serta realisasi PPh pasal 25 tahun pajak 2007 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 15
 Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak (PPh Pasal 25)

No	Kantor Wilayah	Berdasarkan SPT 2006	Setelah kenaikan harga CPO	Realisasi PPh 25 -- 2007
1	Kanwil NAD	112,01 %	218,02 %	1.210,91 %
2	Kanwil Sumut I	59,16 %	138,74 %	35,75 %
3	Kanwil Sumut II	105,11 %	207,67 %	161,50 %
4	Kanwil Riau dan Kep. Riau	43,06 %	114,59 %	119,65 %
5	Kanwil Sumbar dan Jambi	28,63 %	92,94 %	120,70 %
6	Kanwil Sumsel & Babel	121,07 %	231,60 %	80,99 %
7	Kanwil Bengkulu & Lamp	6,63 %	59,95 %	27,85 %
8	Kanwil Jakpus	83,14 %	174,70 %	624,36 %
9	Kanwil Jaksel	53,10 %	129,65 %	207,10 %
10	Kanwil Jaktim	55,75 %	133,63 %	158,39 %
11	Kanwil Jakbar	1.204,91 %	1.857,37 %	565,09 %
12	Kanwil Jakut	87,17 %	180,75 %	152,68 %
13	Kanwil Jak-Khusus	46,88 %	120,33 %	124,90 %
14	Kanwil Jabar	7,71 %	61,56 %	997,66 %
15	Kanwil Jatim I	3,61 %	55,42 %	12,26 %
16	Kanwil Jatim II	96,97 %	195,45 %	23,18 %
17	Kanwil Kalbar	294,99 %	492,48 %	332,96 %
18	Kanwil Kalsel-Teng	2,68 %	54,01 %	118,80 %
19	Kanwil Kaltim	40.813,97 %	61.270,95 %	27,49 %
20	Kanwil Sulsel	354,53 %	581,79 %	90,70 %
21	Kanwil Sulut	948,20 %	1.472,29 %	4.351,40 %
22	Kanwil Bali	21,07 %	81,61 %	137,51 %
23	Kanwil LTO	63,15 %	144,73 %	435,23 %
	Rata-rata pertumbuhan	57,68 %	136,52 %	26,667 %

Sumber : Data TIP , Data Diolah

Faktor-faktor lain penentu PPh pasal 25 dalam penelitian ini (biaya, berbagai regulasi perpajakan dan sebagainya) selain kenaikan harga CPO dianggap konstan. Meskipun dalam kenyataannya, tidak selalu kenaikan peredaran usaha akan diikuti oleh kenaikan PPh pasal 25. Wajib pajak secara rasional tetap berusaha untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan, walaupun terjadi kenaikan peredaran usaha yang lebih besar daripada kenaikan biaya operasional.

Deterrent effect atau efek jera akibat penyidikan pajak atas Asian Agri Group dapat ditunjukkan dengan peningkatan kepatuhan perpajakan sektor industri dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Secara garis besar, telah disebutkan bahwa terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan yang cukup signifikan sepanjang tahun pajak 2007. Uji Wilcoxon akan membantu pembuktian signifikansi peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari pembayaran PPh pasal 25 antara sebelum dan setelah penyidikan pajak atas Asian Agri Group. Hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan perolehan PPh pasal 25 antara sebelum dan setelah dilakukan penyidikan pajak atas Asian Agri Group. Penelitian ini hendak menguji 3 (tiga) hipotesa yaitu :

- 1) $H_0 : a = 0$ atau perolehan PPh pasal 25 sektor perkebunan kelapa sawit tidak ada perbedaan antara sebelum dan setelah penyidikan pajak atas Asian Agri Group
 $H_1 : a \neq 0$ atau perolehan PPh pasal 25 sektor perkebunan kelapa sawit ada perbedaan antara sebelum dan setelah penyidikan pajak atas Asian Agri Group
- 2) $H_0 : b = 0$ atau perolehan PPh pasal 25 sektor industri minyak kasar kelapa sawit tidak ada perbedaan antara sebelum dan setelah penyidikan pajak atas Asian Agri Group
 $H_1 : b \neq 0$ atau perolehan PPh pasal 25 sektor industri minyak kasar kelapa sawit ada perbedaan antara sebelum dan setelah penyidikan pajak atas Asian Agri Group
- 3) $H_0 : c = 0$ atau perolehan PPh pasal 25 sektor perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kasar kelapa sawit tidak ada perbedaan antara sebelum dan setelah penyidikan pajak atas Asian Agri Group
 $H_1 : c \neq 0$ atau perolehan PPh pasal 25 sektor perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kasar kelapa sawit ada perbedaan antara sebelum dan setelah penyidikan pajak atas Asian Agri Group

Berdasarkan hasil analisis penelitian dengan menggunakan uji Wilcoxon untuk tahun pajak 2005 dibandingkan dengan tahun pajak 2006 (sebelum penyidikan atas Asian Agri Group) dapat diketahui hasilnya sebagai berikut :

- Data KLU 01134 (perkebunan kelapa sawit)

Ho : $\alpha = 0$ atau penerimaan PPh pasal 25 sektor perkebunan kelapa sawit tidak ada perbedaan antara tahun pajak 2005 dan 2006

Hi : $\alpha \neq 0$ atau penerimaan PPh pasal 25 sektor perkebunan kelapa sawit ada perbedaan antara tahun pajak 2005 dan 2006

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
KBN_06 - KBN_05 Negative Ranks	6 ^a	10,17	61,00
Positive Ranks	12 ^b	9,17	110,00
Ties	5 ^c		
Total	23		

a. KBN_06 < KBN_05

b. KBN_06 > KBN_05

c. KBN_05 = KBN_06

Test Statistics^b

	KBN_06 - KBN_05
Z	-1,067 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,286

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

- Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji Wilcoxon, *table rank* menunjukkan bahwa terdapat 6 sampel tahun pajak 2006 yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan tahun pajak 2005 (*negative rank*). Sementara *positive rank* atau sampel tahun pajak 2006 dengan nilai lebih besar daripada tahun pajak 2005 berjumlah 12. Nilai *ties* (jumlah nilai sama) sebanyak 5 sampel.
- Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa dari z hitung diperoleh 1,067 (nilai negative diabaikan). Karena nilai z hitung tersebut lebih kecil dari nilai z table ($\pm 1,96$) maka Ho diterima. Nilai Asymp.Sig (2-tailed) menunjukkan angka 0,286. Nilai tersebut lebih besar dari Sig 0,05 yang

disyaratkan. Artinya penerimaan PPh pasal 25 sektor perkebunan kelapa sawit tidak terdapat perbedaan (dalam hal ini peningkatan yang signifikan) antara tahun pajak 2005 dan tahun pajak 2006.

- Data KLU 15141 (industri minyak kasar nabati dan hewani)

Ho : $b = 0$ atau penerimaan PPh pasal 25 sektor industri minyak kasar nabati tidak ada perbedaan antara tahun pajak 2005 dan 2006

Hi : $b \neq 0$ atau penerimaan PPh pasal 25 sektor industri minyak kasar nabati ada perbedaan antara tahun pajak 2005 dan 2006

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
IND_06 - IND_05 Negative Ranks	4 ^a	11,50	46,00
Positive Ranks	18 ^b	11,50	207,00
Ties	1 ^c		
Total	23		

a. IND_06 < IND_05

b. IND_06 > IND_05

c. IND_05 = IND_06

Test Statistics^b

	IND_06 - IND_05
Z	-2,613 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,009

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

- Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji Wilcoxon, *table rank* menunjukkan bahwa terdapat 4 sampel tahun pajak 2006 yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan tahun pajak 2005 (*negative rank*). *Positive rank* atau sampel tahun pajak 2006 dengan nilai lebih besar daripada tahun pajak 2005 menunjukkan jumlah sebanyak 18. Nilai *ties* (jumlah nilai sama) sebanyak 1 sampel.
- Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa dari z hitung diperoleh 2,613 (nilai negative diabaikan). Nilai z hitung tersebut lebih besar dari nilai z table ($\pm 1,96$) sehingga Hi diterima. Selain itu, nilai Asymp.Sig (2-tailed) juga menunjukkan angka 0,009. Nilai ini lebih kecil dari Sig 0,05 yang

disyaratkan. Artinya penerimaan PPh pasal 25 sektor industri minyak kasar nabati terdapat perbedaan (dalam hal ini peningkatan yang signifikan) antara tahun pajak 2005 dan tahun pajak 2006.

- Data gabungan KLU 01134 dan 15141

Ho : $c = 0$ atau penerimaan PPh pasal 25 gabungan sektor industri dan perkebunan kelapa sawit tidak ada perbedaan antara tahun pajak 2005 dan 2006

Hi : $c \neq 0$ atau penerimaan PPh pasal 25 gabungan sektor industri dan perkebunan kelapa sawit ada perbedaan antara tahun pajak 2005 dan 2006

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
KBIN_06 - KBIN_05	Negative Ranks	8 ^a	100,00
	Positive Ranks	15 ^b	176,00
Ties	0 ^c		
Total	23		

a. KBIN_06 < KBIN_05

b. KBIN_06 > KBIN_05

c. KBIN_05 = KBIN_06

Test Statistics^b

	KBIN_06 - KBIN_05
Z	-1,156 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,248

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

- Jumlah populasi yang diamati sebanyak 23 dengan hasil sebagai berikut : *table rank* menunjukkan bahwa terdapat 8 sampel tahun pajak 2006 yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan tahun pajak 2005 (*negative rank*), *positive rank* atau sampel tahun pajak 2006 dengan nilai lebih besar daripada tahun pajak 2005 berjumlah 15, dan nilai *ties* (jumlah nilai sama) sebanyak 0 sampel.
- Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa dari z hitung diperoleh nilai 1,156 (nilai negative diabaikan). Nilai z hitung tersebut lebih kecil dari nilai z

table ($\pm 1,96$) maka H_0 diterima. Di sisi lain, nilai Asymp.Sig (2-tailed) juga menunjukkan angka 0,248. Nilai tersebut lebih besar dari Sig 0,05 yang disyaratkan. Artinya penerimaan PPh pasal 25 gabungan sektor industri dan perkebunan kelapa sawit tidak terdapat perbedaan (dalam hal ini peningkatan yang signifikan) antara tahun pajak 2005 dan tahun pajak 2006.

Berdasarkan analisis uji Wilcoxon kepatuhan wajib pajak sektor industri dan perkebunan kelapa sawit untuk tahun pajak 2005 dan 2006 secara keseluruhan tidak menunjukkan perbedaan (peningkatan yang cukup signifikan). Hal ini merupakan indikasi tidak adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak sektor industri dan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam meningkatkan jumlah pembayaran masa PPh pasal 25. Tidak terdapat pemicu bagi wajib pajak untuk meningkatkan jumlah pembayaran PPh pasal 25 sebelum penyidikan pajak atas Asian Agri Group pada tahun pajak 2007 dilakukan.

Langkah selanjutnya untuk mengetahui ada / tidaknya *deterrent effect* penyidikan pajak Asian Agri Group terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sektor industri dan perkebunan kelapa sawit yaitu dengan analisis data penerimaan PPh pasal 25 tahun pajak 2006 dan 2007 (setelah dilakukan penyidikan pajak atas Asian Agri Group) adalah sebagai berikut ini :

- Data KLU 01134 (perkebunan kelapa sawit)

H_0 : $a = 0$ atau penerimaan PPh pasal 25 sektor perkebunan kelapa sawit tidak ada perbedaan antara tahun pajak 2006 dan 2007.

H_1 : $a \neq 0$ atau penerimaan PPh pasal 25 sektor perkebunan kelapa sawit ada perbedaan antara tahun pajak 2006 dan 2007.

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
KBN_07 - KBN_06 Negative Ranks	1 ^a	10,00	10,00
Positive Ranks	17 ^b	9,47	161,00
Ties	5 ^c		
Total	23		

a. KBN_07 < KBN_06

b. KBN_07 > KBN_06

c. KBN_06 = KBN_07

Test Statistics^b

	KBN_07 - KBN_06
Z	-3,288 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,001

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

- Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji Wilcoxon, *table rank* menunjukkan bahwa terdapat 1 sampel tahun pajak 2007 yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan tahun pajak 2006 (*negative rank*), terdapat 17 sampel tahun pajak 2007 dengan nilai lebih besar daripada tahun pajak 2006 (*positive rank*) serta nilai *ties* (jumlah nilai sama) sebanyak 5 sampel.
- Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa dari z hitung diperoleh 3,288 (nilai negative diabaikan). Sebagaimana telah disepakati sebelumnya, apabila nilai z hitung tersebut lebih besar dari nilai z table ($\pm 1,96$) maka H_0 ditolak. Nilai Asymp.Sig (2-tailed) juga menunjukkan angka 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari Sig 0,05 yang disyaratkan. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa penerimaan PPh pasal 25 sektor perkebunan kelapa sawit terdapat perbedaan (dalam hal ini peningkatan yang signifikan) antara tahun pajak 2006 dan tahun pajak 2007.

- Data KLU 15141 (industri minyak kasar dari nabati dan hewani)

H_0 : b = 0 atau penerimaan PPh pasal 25 sektor industri minyak kasar nabati tidak ada perbedaan antara tahun pajak 2006 dan 2007

Hi : $b \neq 0$ atau penerimaan PPh pasal 25 sektor industri minyak kasar nabati ada perbedaan antara tahun pajak 2006 dan 2007.

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
IND_07 - IND_06	Negative Ranks	2 ^a	10,00	20,00
	Positive Ranks	20 ^b	11,65	233,00
	Ties	1 ^c		
	Total	23		

a. IND_07 < IND_06

b. IND_07 > IND_06

c. IND_06 = IND_07

Test Statistics^b

	IND_07 - IND_06
Z	-3,458 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,001

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

- *Table rank* menunjukkan bahwa terdapat 2 sampel tahun pajak 2007 yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan tahun pajak 2006 (*negative rank*). *Positive rank* atau sampel tahun pajak 2007 dengan nilai lebih besar daripada tahun pajak 2006 berjumlah 20. Nilai *ties* (jumlah nilai sama) sebanyak 1 sampel.
- Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa dari z hitung diperoleh 3,458 (nilai negative diabaikan). Nilai z hitung tersebut lebih besar dari nilai z table ($\pm 1,96$) maka H_0 di tolak dan H_1 di terima. Pertimbangan lain menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig* (2-tailed) berada pada angka 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari Sig 0,05 yang disyaratkan. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan PPh pasal 25 sektor industri minyak kasar nabati terdapat perbedaan (dalam hal ini peningkatan yang signifikan) antara tahun pajak 2006 dan tahun pajak 2007.

- Data gabungan KLU 01134 dan 15141

Ho : $c = 0$ atau gabungan penerimaan PPh pasal 25 sektor industri dan perkebunan kelapa sawit tidak ada perbedaan antara tahun pajak 2006 dan 2007.

Hi : $c \neq 0$ atau penggabungan penerimaan PPh pasal 25 sektor industri dan perkebunan kelapa sawit ada perbedaan antara tahun pajak 2006 dan 2007.

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
KBIN_07 - KBIN_06			
Negative Ranks	0 ^a	,00	,00
Positive Ranks	23 ^b	12,00	276,00
Ties	0 ^c		
Total	23		

a. KBIN_07 < KBIN_06

b. KBIN_07 > KBIN_06

c. KBIN_06 = KBIN_07

Test Statistics^b

	KBIN_07 - KBIN_06
Z	-4,197 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

- Data gabungan merupakan jumlah akumulasi antara data perkebunan kelapa sawit dan data industri minyak kasar dari nabati dalam hal ini minyak kelapa sawit. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji Wilcoxon, *table rank* menunjukkan bahwa terdapat 0 sampel tahun pajak 2007 yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan tahun pajak 2006 (*negative rank*). *Positive rank* atau sampel tahun pajak 2007 dengan nilai lebih besar daripada tahun pajak 2006 berjumlah 23 atau seluruh sampel bernilai positif dengan nilai *ties* (jumlah nilai sama) sebanyak 0 sampel.
- Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa dari z hitung diperoleh 4,197 (nilai negative diabaikan). Nilai z hitung tersebut lebih besar dari nilai z table ($\pm 1,96$) maka Ho ditolak. Nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* juga

menunjukkan angka 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari Sig 0,05 yang disyaratkan. Dengan kata lain, gabungan penerimaan PPh pasal 25 sektor industri dan perkebunan kelapa sawit terdapat perbedaan (dalam hal ini peningkatan yang signifikan) antara tahun pajak 2006 dan 2007.

Secara gabungan, untuk tahun pajak 2007, berdasarkan data penerimaan pajak per Kantor Wilayah DJP terdapat peningkatan jumlah pembayaran angsuran PPh pasal 25 baik secara *partial* maupun gabungan untuk sektor industri dan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, peningkatan pembayaran PPh pasal 25 yang dilakukan oleh wajib pajak tidak hanya dilihat berdasarkan nominal pertambahan namun lebih menekankan pada tingkat signifikansi (*materialitas*) peningkatan pembayaran PPh pasal 25. Bisa saja secara nominal terdapat peningkatan pembayaran misalnya tahun pajak 2006 jumlah pembayaran Rp 1.000.000,- dan tahun pajak 2007 jumlah pembayaran menjadi Rp 1.005.000,-. Meskipun secara nominal terjadi peningkatan, namun secara *materialitas* dianggap tidak terdapat peningkatan. Berbeda halnya apabila pembayaran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berjumlah Rp 1.000.000,- dan terjadi peningkatan pembayaran pajak di tahun pajak 2007 menjadi sebesar Rp 1.750.000,-. Baik secara nominal maupun *materialitas* terdapat peningkatan pembayaran pajak PPh pasal 25. Hal inilah yang diukur melalui uji Wilcoxon tersebut.

Berikut ini ringkasan hasil pengujian Wilcoxon antara data sebelum dan setelah dilakukan penyidikan pajak atas Asian Agri Group :

Tabel 16

Ringkasan Tingkat Keberhasilan

Sektor	Pertumbuhan PPh Ps 25 sebelum penyidikan	Pertumbuhan PPh Ps 25 setelah penyidikan
Perkebunan	X	OK
Industri	OK	OK
Perkebunan dan industri	X	OK

Secara garis besar, sebelum penyidikan pajak atas Asian Agri Group tidak terdapat pertumbuhan penerimaan PPh pasal 25 yang signifikan. Kenaikan PPh pasal 25 hanya terjadi pada sektor industri minyak kelapa sawit yang diwakili oleh KLU 15141. Hal yang berbeda terjadi pada saat setelah dilakukan penyidikan atas Asian Agri Group. Secara

keseluruhan baik sektor perkebunan maupun industri kelapa sawit mengalami peningkatan pertumbuhan penerimaan PPh pasal 25 yang signifikan.

Berdasarkan tabel 12 diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan pajak tahun pajak 2007 untuk masing-masing Kantor Wilayah tidak sama. Salah satu cara untuk mengukur kinerja setiap Kantor Wilayah khususnya sektor industri dan perkebunan kelapa sawit (hanya diwakili oleh 2 KLU dari sektor tersebut) melalui besarnya penerimaan pajak dalam hal ini PPh pasal 25 untuk masing-masing Kantor Wilayah. Analisis data yang digunakan adalah uji Multivariate Anova dengan *variable dependent* lebih dari satu. Berikut ini akan dijelaskan tentang kinerja setiap kantor wilayah terutama yang berhubungan dengan penerimaan PPh pasal 25 melalui analisis uji Multivariate, dimulai dari tahun pajak 2004 sampai dengan tahun pajak 2007 (data terlampir) :

- Berdasarkan tabel deskriptif tersebut, maka rata-rata perolehan PPh 25 Kanwil LTO mempunyai rata-rata tertinggi baik di sektor Perkebunan (Rp 459.379.221.941) maupun sektor Industri (Rp 157.132.000.000) dibandingkan dengan Kanwil lainnya. Sementara rata-rata perolehan terendah PPh 25 adalah Kanwil SULUT untuk sektor Perkebunan (Rp 1.418.766) dan Kanwil Bali untuk sektor Industri Sawit (Rp 1.200.000).
- Berikut ini adalah deskripsi jumlah sampel dari masing-masing grup untuk analisis MANOVA (Multivariate - analysis of varian). Misalnya, Kantor Wilayah NAD menyajikan dua sampel untuk analisis, sementara baik SUMUT I dan SUMUT II menyajikan 4 sampel (yaitu dari tahun 2004 sampai dengan 2007). Pengambilan sampel tersebut berdasarkan kelengkapan data dari sampel yang akan diuji.

Multivariate Anova Test - Descriptives

		Descriptives							
		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
KNJR_KBN	NAD	4	11625344280.75	17922089611.60	9.0E+09	-1.6893E+10	4.014E+10	2.18E+09	3.85E+10
	SUMUT I	4	42295127452.50	17554106000.63	8.8E+09	1.436E+10	7.023E+10	2.69E+10	5.82E+10
	SUMUT II	4	3191204434.00	3764562643.31	1.9E+09	-2799054804	9181463672	9.11E+08	8.78E+09
	RIAU-KEP	4	75408888518.50	51348269316.29	2.6E+10	-6297666466	1.571E+11	2.69E+10	1.47E+11
	SUMBAR & JAMBI	4	14610814404.50	6237319245.31	3.1E+09	4685847611	2.454E+10	8.15E+09	2.27E+10
	SUMSEL & BABEL	4	21638966131.25	19930867797.77	1.0E+10	-1.0075E+10	5.335E+10	3.94E+09	4.87E+10
	BKL & LPG	4	963686239.75	1130335504.89	5.7E+08	-834929786	2762302265	64173050	2.59E+09
	JAKPUS	4	25674150338.25	35153101917.75	1.8E+10	-3.0262E+10	8.161E+10	73986634	7.57E+10
	JAKSEL	4	130582004403.75	145325387972.13	7.3E+10	-1.0066E+11	3.618E+11	1.30E+09	3.38E+11
	JAKTIM	4	138609207566.50	90889466039.34	4.5E+10	-6016215127	2.832E+11	8.70E+10	2.74E+11
	JAKBAR	4	2711600719.25	4062068103.43	2.0E+09	-3752056095	9175257533	3.75E+08	8.78E+09
	JAKUT	2	5130688440.00	3157856634.12	2.2E+09	-2.3242E+10	3.350E+10	2.90E+09	7.36E+09
	JAK-KHUSUS	4	273548344799.75	136236567179.42	6.8E+10	5.677E+10	4.903E+11	1.61E+11	4.70E+11
	JABAR	0
	JATIM I	0
	JATIM II	0
	KALBAR	1	5542156.00	5542156	5542156
	KALSEL-TENG	3	216067492.33	262430238.26	1.5E+08	-435845359	867980343.9	12608728	5.12E+08
	KALTIM	4	27285226472.75	9352883578.67	4.7E+09	1.240E+10	4.217E+10	1.75E+10	4.00E+10
	SULSEL	4	11305239.00	8870995.64	4435498	-2810494.66	25420972.66	4692406	24018144
	SULUT	0
	BALI	4	1418766.50	570445.75	285222.87	511060.02	2326472.98	831770	2201196
	LTO	4	459379221941.50	380080195941.13	1.9E+11	-1.4541E+11	1.064E+12	2.21E+11	1.02E+12
Total	70	70300873833.53	151026970448.32	1.8E+10	3.429E+10	1.063E+11	831770	1.02E+12	
KNJR_IND	NAD	2	1200000.00	.00	.00	1200000.00	1200000.00	1200000	1200000
	SUMUT I	4	81553699535.00	22842668789.69	1.1E+10	4.521E+10	1.179E+11	6.84E+10	1.16E+11
	SUMUT II	4	10889371108.50	5619125716.78	2.8E+09	1948088170	1.983E+10	7.57E+09	1.93E+10
	RIAU-KEP	4	127148274122.75	45194261168.20	2.3E+10	5.523E+10	1.991E+11	8.26E+10	1.89E+11
	SUMBAR & JAMBI	4	17246381371.00	8138221720.01	4.1E+09	4296654549	3.020E+10	1.07E+10	2.81E+10
	SUMSEL & BABEL	4	12188373864.25	4528929441.58	2.3E+09	4981836480	1.939E+10	6.54E+09	1.76E+10
	BKL & LPG	4	9640005115.50	793475893.22	4.0E+08	8377407903	1.090E+10	9.07E+09	1.08E+10
	JAKPUS	4	116873370270.75	196292808035.13	9.8E+10	-1.9547E+11	4.292E+11	6.90E+09	4.10E+11
	JAKSEL	3	2848101394.33	2812353998.66	1.6E+09	-4138173233	9834376021	81170170	5.70E+09
	JAKTIM	3	1064799435.67	423976863.09	2.4E+08	11582521.15	2118016350	5.75E+08	1.31E+09
	JAKBAR	3	61700803.33	64373913.96	3.7E+07	-98212863.99	221614470.7	10147710	1.34E+08
	JAKUT	4	686225700.75	1296270007.30	6.5E+08	-1376429147	2748880548	30364602	2.63E+09
	JAK-KHUSUS	4	23369586611.00	18169262908.07	9.1E+09	-5541765195	5.228E+10	5.40E+09	4.87E+10
	JABAR	4	2082329832.50	1257849036.16	6.3E+08	80811323.63	4083848341	2.80E+08	3.08E+09
	JATIM I	4	62133788.00	40437045.34	2.0E+07	-2210574.78	126478150.8	25643926	1.00E+08
	JATIM II	3	977498726.67	837664407.38	4.8E+08	-1103375017	3058372471	26083330	1.60E+09
	KALBAR	3	68420821.00	69234894.88	4.0E+07	-103568192	240409834.3	27631490	1.48E+08
	KALSEL-TENG	2	9559313950.00	13306355136.65	9.4E+09	-1.0999E+11	1.291E+11	1.50E+08	1.90E+10
	KALTIM	3	3224263.00	1192994.95	688775.96	260699.25	6187826.75	2000000	4383315
	SULSEL	4	3680925.25	1853285.75	926642.87	731934.06	6629916.44	2453620	6392709
	SULUT	4	310983117.00	542566434.68	2.7E+08	-552361156	1174327390	19861700	1.12E+09
	BALI	4	3174762.25	2383393.45	1191697	-617748.59	6967273.09	529600	6300559
	LTO	1	157132000000.00	1.57E+11	1.57E+11
Total	79	22779172464.94	57678601146.86	6.5E+09	985986977	3.570E+10	529600	4.10E+11	

Multivariate Anova Test – Subject Factors

Between-Subjects Factors			
		Value Label	N
KANTOR	1	NAD	2
	2	SUMUT I	4
	3	SUMUT II	4
	4	RIAU-KEP	4
	5	SUMBAR & JAMBI	4
	6	SUMSEL & BABEL	4
	7	BKL & LPG	4
	8	JAKPUS	4
	9	JAKSEL	3
	10	JAKTIM	3
	11	JAKBAR	3
	12	JAKUT	2
	13	JAK-KHUSUS	4
	16	JATIM II	1
	17	KALBAR	3
	18	KALSEL-TENG	2
	19	KALTIM	3
	21	SULUT	4
	23	LTO	1

- Ho: $d = 0$ atau ke-23 varians populasi (Kantor-kantor Wilayah) tidak ada perbedaan.
Hi: $d \neq 0$ atau ke-23 varians populasi (Kantor-kantor Wilayah) ada perbedaan

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

	F	df1	df2	Sig.
KNJR_KBN	4.259	18	40	.000
KNJR_IND	5.318	18	40	.000

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept+KANTOR

Terlihat bahwa nilai probabilitas **Lavene Test** untuk sektor Perkebunan adalah 0.000 dan sektor Industri juga 0.000. Nilai ini berada di bawah Sig 0.05 dengan demikian Ho ditolak. Artinya ke-23 varians populasi (Kantor-kantor Wilayah) kinerjanya berbeda.

- $H_0: e = 0$ atau ke-23 rata-rata vektor sampel dari skor rata-rata adalah tidak ada perbedaan.

$H_1: e \neq 0$ atau ke-23 rata-rata vektor sampel dari skor rata-rata adalah ada perbedaan

Multivariate Tests ^c						
Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.811	83.849 ^a	2.000	39.000	.000
	Wilks' Lambda	.189	83.849 ^a	2.000	39.000	.000
	Hotelling's Trace	4.300	83.849 ^a	2.000	39.000	.000
	Roy's Largest Root	4.300	83.849 ^a	2.000	39.000	.000
KANTOR	Pillai's Trace	1.400	5.184	36.000	80.000	.000
	Wilks' Lambda	.037	9.137 ^a	36.000	78.000	.000
	Hotelling's Trace	14.334	15.130	36.000	76.000	.000
	Roy's Largest Root	13.450	29.890 ^b	18.000	40.000	.000

a. Exact statistic
 b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.
 c. Design: Intercept+KANTOR

Terlihat bahwa semua angka uji dari **Multivariate Test** (Pillal's Trace, Wilks' Lamda, Hotelling's Trace, dan Roy's Largest Root) menunjukkan angka Sig 0.000. Nilai ini dibawah Sig 0.05 yang disyaratkan, dengan demikian H_0 ditolak. Artinya, program *extra effort* mempunyai dampak berbeda bagi setiap Kanwil, yang ditunjukkan dari kinerja perolehan PPh 25 baik di sektor Perkebunan maupun sektor Industri.